

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 26 September 2014

Subyek : Iklim

Hal : 14

## SBY : TAHAN LAJU PERUBAHAN IKLIM

Berbicara di depan 40 lebih kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa dunia harus melipatgandakan upaya menahan laju perubahan iklim global. Caranya, memperkuat kerja sama multilateral memfinalisasi perjanjian mengikat secara hukum pasca 2020.

Itu disampaikan Presiden saat berpidato di Sesi Plenary 1 UN Climate Summit 2014: Catalizing Action dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, Rabu (23/09) malam waktu setempat.

"Kami sangat senang mengumumkan bahwa dengan kerja sama erat bersama pemerintahan Norwegia, kami tidak hanya berhasil mereduksi emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal," kata Presiden seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri.

Komitmen Indonesia kepada dunia adalah menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) 26 persen pada 2020. Jika didukung internasional, Indonesia menurunkan emisi GRK 41 persen.

Secara khusus, Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia juga menghentikan (moratorium) pemberian izin usaha baru dalam hutan primer dan lahan gambut sejak tahun 2011.

Presiden menekankan bahwa usaha mitigasi perubahan iklim tak hanya bertujuan menyelamatkan hutan hujan. Usaha itu juga guna menyejahterakan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk bertahan hidup.

Indonesia, dengan wilayah maritim yang sangat kaya juga sedang menjajaki kemungkinan ekosistem karbon biru sebagai penyerap karbon. Hal itu akan berguna mendukung upaya menahan laju kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celsius.

Itu dinilai sangat vital karena banyak negara pesisir yang terancam kehilangan wilayah jika temperatur dunia meningkat lebih dari 2 derajat celsius.

Amandemen Doha

Secara resmi, Indonesia juga sudah menandatangani surat penerimaan Amandemen Doha, terkait Protokol Kyoto. "Akhirnya, Indonesia siap menguatkan kerja sama di level bilateral dan multilateral. Kerja sama yang baik adalah suatu keharusan," kata Presiden.

Amandemen Doha adalah kesepakatan negara-negara yang ingin memastikan komitmen negara-negara maju tetap wajib menurunkan emisi GRK-nya. Itu jalan bagi komitmen kedua dari Protokol Kyoto yang habis masa berlakunya pada 2012.

Sementara itu, seperti dilaporkan wartawan Kompas, M Zaid Wahyudi, dari New York, se usai berbicara pada diskusi The Forest and Climate Challenge, Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan (REDD+) bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Selama ini, pengelolaan hutan diidentikkan dengan mengambil kayu dengan menebang pohon. Padahal, pohon yang dibiarkan tumbuh menghasilkan lebih.

Konsep itulah yang ingin dikenalkan pemerintah melalui program REDD+. Mengubah paradigma aparat pemerintah dan politisi adalah sulit karena selama ini mereka terbiasa memberi izin konsesi lahan. "Paradigma itu akan menjadi musuh para penebang hutan yang justru memiliki lobi kuat," katanya.

Paradigma pengelolaan hutan Indonesia, kata Kuntoro, saat ini masih terlalu kapitalistik. Itu juga tidak menjamin pemerataan kekayaan. Pemerintahan baru diharapkan tak langsung menolak program REDD+ karena Indonesia juara dalam pengelolaan dan pembangunan hutan berkelanjutan